



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROTE NDAO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810725 200604 1 018

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikaor sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	99,90	99,90	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	skor	3,00	3,35	111,67	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				105,83	Sangat Tinggi
Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	skor	85	100	117,65	Sangat Tinggi
		Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	90,91	100	110,00	Sangat Tinggi
		Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	85	100	117,65	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				115,10	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						180,45	Sangat Tinggi

Secara umum rata-rata capaian kinerja sebesar **180,45%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan capaian kinerja indikator tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** sebesar **105,83%** (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** sebesar **115,10%** (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, melalui peningkatan kinerja pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian berbasis *e-government*;
- 2) Tersedianya produk regulasi/kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) Tersedianya infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang mampu mendukung *running*-nya aplikasi utama dilingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (*e-planning, e-budgeting, e-perijinan, e-sakip, e-procurement, e-auditee, e-Rekon&LK* dan lain-lain); dan
- 4) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran ini masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Terbatasnya anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja ditahun-tahun mendatang akan ditempuh langkah-langkah solutif sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:
 - Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagai dasar usulan kebutuhan aparatur kepada pimpinan daerah; dan
 - Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara teknis maupun fungsional;

- 2) Peningkatan anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, melalui Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Telaahan Staf/Informasi Staf; dan
- 3) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:
 - Pemeliharaan (*maintenance*) sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat digunakan secara efektif dalam penggunaannya;
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia melalui *Upgrading/Updating* perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) pendukung pelayanan; dan
 - Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan guna pendukung pelayanan.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.721.264.023,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Juta*) terealisasi sebesar Rp.2.630.414.963,- (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta*) atau sebesar 96,66%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program/kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,09% atau dikategorikan Efektif. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas dengan rasio 1,19 sehingga dikategorikan Efektif.

Ba'a, Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Iktisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	12
E. Sistematika Pelaporan	13
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	15
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Capaian Kinerja	26
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
1. Capaian Kinerja Tujuan	28
2. Capaian Kinerja Sasaran	37
D. Kinerja Keuangan	48
1. Realisasi Keuangan	49
2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja	51
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 1.4	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 3.1	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	27
Tabel 3.4	Capain Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia...	29
Tabel 3.5	Survei Kepuasan Masyarakat	30
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	36
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	39
Tabel 3.8	Layanan Informasi Publik Tahun 2024	40
Tabel 3.9	Layanan Aplikasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Pada Tahun 2024.....	43
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	48
Tabel 3.11	Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	49
Tabel 3.12	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao	4
Gambar 3.1	Trend Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	31
Gambar 3.2	Trend Capaian Kinerja Indeks SPBE	31
Gambar 3.3	Trend Indeks Keterbukaan Informasi Publik	40
Gambar 3.4	Trend Persentase Perangkat Daerah yang teringrasi Dalam satu data.....	42
Gambar 3.4	Trend Persentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Menerapkan keamanan Informasi.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja

pelayanan dan mendorong terwujudnya *Good Governance and clean Government*.

LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan. LKIP ini menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan;
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dari pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024;

- b. *Aspek Manajemen Kinerja* yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
- c. *Aspek penerapan SAKIP* yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

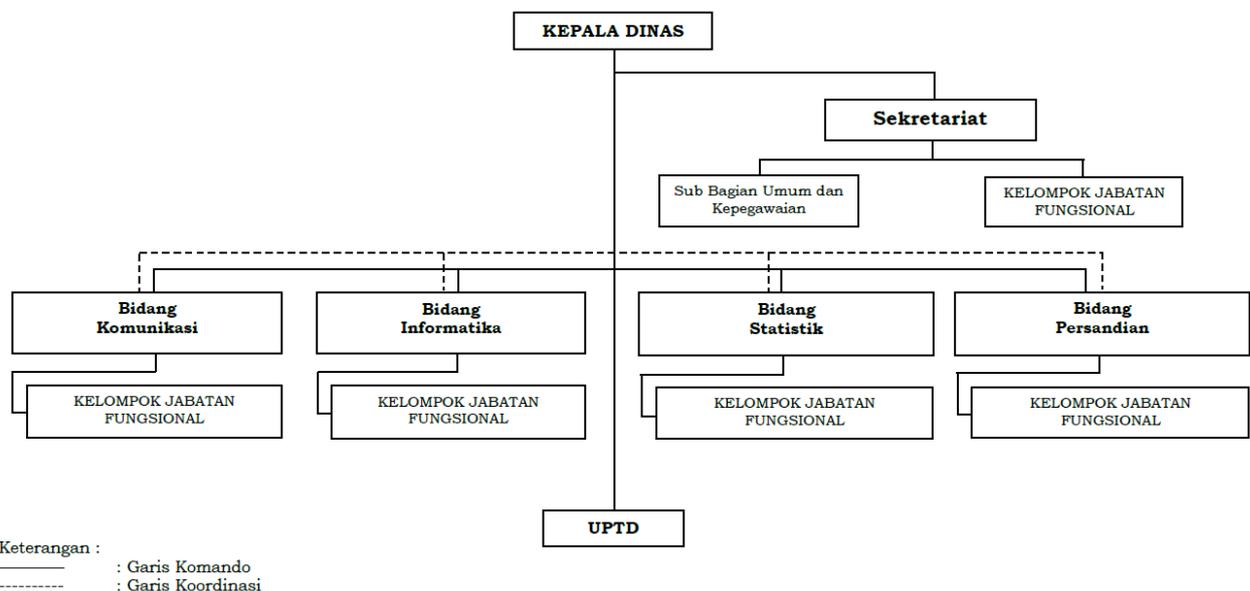
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao



Adapun Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. Tenaga senior yang ditunjuk melaksanakan tugas tambahan sebagai sub koordinator yang bertugas membantu koordinator (sekretaris/kepala bidang) dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset;
- b. Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Informasi;
- d. Sub Koordinator Substansi Jaringan Komunikasi dan Kemitraan Media;
- e. Sub Koordinator Substansi Peliputan dan Komunikasi;
- f. Sub Koordinator Substansi Teknologi dan Informasi;
- g. Sub Koordinator Substansi Penyiaran dan Pengelolaan Informasi;
- h. Sub Koordinator Substansi Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika;
- i. Sub Koordinator Substansi Statistik Sosial;
- j. Sub Koordinator Substansi Statistik Produksi;
- k. Sub Koordinator Substansi Statistik Distribusi;
- l. Sub Koordinator Substansi Pengamanan Informasi;
- m. Sub Koordinator Substansi Hubungan Komunikasi Sandi; dan
- n. Sub Koordinator Substansi Pembinaan Persandian.

3. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/a	Pembina	2	2	4
<i>Jumlah Golongan IV</i>			2	2	4
3	III/d	Penata Tk.I	2	3	5
4	III/c	Penata	2	1	3
5	III/b	Penata Muda Tk.I	2	1	3
6	III/a	Penata Muda	2	6	8
<i>Jumlah Golongan III</i>			8	11	19
7	II/d	Pengatur Tk.I	1	-	1
8	II/c	Pengatur	1	-	1
9	II/b	Pengatur Muda Tk.I	-	1	1
<i>Jumlah Golongan II</i>			2	1	3
TOTAL			12	14	26

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	2	1	3
2	S1	6	9	15
3	D3	2	1	3
4	SLTA/SMK	2	3	5
Total		12	14	26

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 [dua puluh enam) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 3 (tiga) orang, S1 berjumlah 15 (lima belas) orang, D3 berjumlah 3 (tiga) orang, dan SMA berjumlah 5 (lima) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama Pegawai	Jabatan / Golongan Ruang
1	PAUWIL J. J. NGGILI, S.SOS, M.SI	Kepala Dinas
	NIP. 19810725 200604 1 018	Pembina Tk.I /IV-b
2	MARADEN AYAPI PATOLA, ST,M.Sc	Sekretaris
	NIP.19810330 200802 1 001	Pembina /IV-a
3	OLAFULIHAA M. A. TADDE,S. Kom	Kabid.Komunikasi
	NIP.19820416 200604 2 028	Pembina /IV-a
4	MELKIANUS DAMI, S. Sos	Kabid.Persandian
	NIP.19790812 200501 1 012	Pembina /IV-a
5	TENSY JULIANA NON, S. Sos	Kabid.Statistik
	NIP.19740730 200604 2 013	Pembina /IV-a

No	Nama Pegawai	Jabatan / Golongan Ruang
6	NIHEL E. HENRIK, SH NIP.19711121 200501 2 008	Kabid. Informatika Penata Tk.I /III-d
7	TWENTY A.E PANIE, SE NIP.19750820 200701 1 017	Perencana (Ahli Muda) Penata /III-c
8	MEISY M. DAULIMA, SE NIP.19790506 200604 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian Penata Tk.I /III-d
9	MARTHA DADJO,SH NIP. 19810503 200701 2 009	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Ahli Muda) Penata /III-c
10	FLORIDA A. FOES, ST NIP.19820424 200803 2 003	Sandiman (Ahli Muda) Penata Tk.I /III-d
11	DIKSON YANDRY HENDRICO,ST NIP.19840124 201001 1 017	Sandiman (Ahli Muda) Penata Tk.I /III-d
12	ENDEKAN SARUNGALLO, SS, M. I. Kom NIP.19731117 201001 2 007	Analisis Kebijakan (Ahli Muda) Penata Tk.I /III-d
13	SONI ARIANTO ZACHARYA, S.S NIP.19860411 201101 1 016	Statistisi (Ahli Muda) Penata /III-c
14	MUS MBOLIK, SH NIP.19720808 200312 1 006	Analisis Sistem Informasi (JFU/Pelaksana) Penata Muda Tk.I /III-b
15	HARUN NAPU NIP.19751112 199903 1 003	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (JFU/Pelaksana) Penata Muda Tk.I /IIIb
16	SERLY YUNITA ADU, S.IKom NIP.19900906 202012 2 004	Pengelola Teknologi Informasi (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
17	JEFRI MABILAKA, S.Sos NIP. 19880711 202203 1 003	Analisis Berita (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
18	PARAMITHA S. MENOH, S.Kom NIP. 19881005 202203 2 004	Analisis Statistik (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
19	MARIA T. MARIO, S.Stat NIP. 19970422 202203 2 004	Analisis Statistik (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
20	MAHALIA D. V. RIHI GA, S.IKom NIP. 19970105 202203 2 008	Analisis Berita (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
21	SELFINCIANA D. THENE NIP.19840918 200312 2 003	Pengadministrasi Perencana dan Program (JFU/Pelaksana) Penata Muda /III-a
22	SEMI B. NAUK,A.Md NIP.19770905 201406 1 006	Analisis Sistem Informasi (JFU/Pelaksana) Penata Muda IIIa
23	HENNY S. LESIK NIP.19800627 200701 2 010	Bendahara (JFU/Pelaksana) Penata Muda / IIIa

No	Nama Pegawai	Jabatan / Golongan Ruang
24	JONAS N. MESSAKH NIP. 19770220 200701 1 001	Pengelola Media Centre dan Kemitraan Media Pengatur Tk I/ II-d
25	YAKOBIS I. NESI, A.Md NIP. 19900128 202203 1 005	Operator Sandi dan Telekomunikasi (JFU/Pelaksana) Pengatur / Iic
26	SYENY Y.Z TONAK NIP.19810103 201406 2 007	Penata Liputan Pengatur Muda Tk.I / II-b

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

Selain Pegawai Negeri Sipil, terdapat pelaksanaan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi : 2 Orang
 - Tenaga Teknis : 1 Orang
 - Penjaga Kantor : 1 Orang
 - Sopir : 1 Orang
-
- Jumlah : 5 Orang**

4. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza Nomor Polisi DH 167 YU untuk kendaraan operasional kepala Dinas dan minibus Nomor Polisi DH 9958 YU yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari:
 - a) Sebanyak 1 (satu) unit Honda/Revo Fit F1 Nomor Polisi DH 6033 YU untuk kendaraan operasional kepala sub

bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Kasubag.Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b) Sebanyak 1 (satu) unit Honda/Revo Fit FI Nomor Polisi DH 6032 YU untuk kendaraan operasional kepala Bidang Komunikasi bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab kepala Bidang Komunikasi
- c) Sebanyak 1 (satu) unit Honda New Beat CW Nomor Polisi DH 6164 YU untuk kendaraan operasional kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- d) Sebanyak 1 (satu) unit Honda/Vario Nomor Polisi DH 6163 YU untuk kendaraan operasional Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Kendaraan Roda Empat	2010	1 Unit	Baik
Kendaraan Roda Empat	2015	1 Unit	Baik
Kendaraan Roda Dua	2017	4 Unit	Baik
Air Conditioner 0,5 PK	2017	2 Unit	Baik
Lap Top	2017	3 Unit	Baik
Printer	2017	2 Unit	Baik
Stavolt 1.000 N	2017	3 Unit	Baik
Wireless Router	2017	1 Unit	Baik
UPS	2017	2 Unit	Baik
Camera	2017	1 Unit	Baik
Digital audio tape Recorder	2017	1 Unit	Baik
Genset	2017	1 Unit	Baik
Papan Nama Instansi	2017	1 Buah	Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Papan Nama Ruangan/Jabatan	2017	1 Buah	Baik
Tandon Air	2017	1 Buah	Baik
Laptop	2017	2 Unit	Baik
Komputer Multimedia /Editing	2017	1 Unit	Baik
Komputer	2017	1 Unit	Rusak
Hardisk internal	2017	1 Unit	Baik
Hardisk Eksternal	2017	2 Unit	Baik
Printer	2017	2 Unit	Baik
Scaner	2017	1 Unit	Baik
Faximile	2017	1 Unit	Baik
Layar Proyektor	2017	1 Unit	Baik
Drone	2017	1 Paket (2 unit)	Baik
Switcher/Menara Antena Lain	2017	2 Unit	Baik
Kursi Ruang Tunggu Tamu	2017	1 Unit	Baik
Lemari Arsip	2017	2 Unit	Baik
Rak Buku	2017	2 Unit	Baik
Mesin Fax	2018	1 Unit	Baik
Lap Top	2018	1 Unit	Baik
Hard Disk	2018	1 Unit	Baik
Amplifier	2019	1 Unit	Baik
Personal Komputer	2019	1 Unit	Baik
Laptop	2019	1 unit	Baik
Printer	2019	1 unit	Baik
Hardisk Eksternal	2019	1 unit	Baik
Switcher VGA	2019	1 unit	Baik
Tripod Camera	2019	1 unit	Baik
Kabel VGA	2019	1 unit	Baik
Kabel CCTV	2019	1 unit	Baik
Tenda Pameran (Tenda Besi)	2020	16 Unit	Baik
Laptop	2020	1 unit	Baik
Komputer	2020	1 unit	Baik
Kamera	2020	1 unit	Baik
GPS	2020	1 unit	Baik
Router Wifi	2020	1 unit	Baik
Laptop	2020	1 unit	Baik
Tripot Handycam besar	2020	1 unit	Baik
Webcam Logitech	2020	1 unit	Baik
Personal Computer	2020	1 unit	Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Scanner	2020	1 unit	Baik
Printer	2020	1 unit	Baik
Proyektor	2020	1 unit	Baik
Camera	2020	1 unit	Baik
Jammer	2020	1 unit	Baik
Kacamata Kamera	2020	1 unit	Baik
Balpoint Kamera	2020	3 unit	Baik
Gantungan Kunci Kamera	2020	3 unit	Baik
Hand Phone	2020	1 unit	Baik
Televisi LED	2020	3 unit	Baik
Laptop	2021	1 unit	Baik
Printer	2021	1 unit	Baik
Adaptor Laptop	2021	1 unit	Baik
Air condition Polytron 1 PK	2022	1 Unit	Baik
Laptop Acer	2022	2 Unit	Baik
Printer Tinta Infus Epson	2022	1 Unit	Baik
Printer Tinta Infus Epson All in one	2022	3 Unit	Baik
Personal Computer Lenovo memory 8 GB DDR4	2022	1 Unit	Baik
Personal Computer Lenovo memory 4 GB DDR4	2022	1 Unit	Baik
Personal Computer Lenovo memory 8 GB DDR4	2022	1 Unit	Baik
Personal Computer Lenovo all in one V50A	2022	1 Unit	Baik
Laptop MSI	2022	3 Unit	Baik
Harddisk Eksternal 1 TB	2022	1 Unit	Baik
Camera PTZ HDMI	2024	1	Baik
Handy Cam full HD	2024	2	Baik
HDMI Wireless	2024	2	Baik
Penjepit	2024	1	Baik
Rode Condenser Michropone	2024	1	Baik
Tripod	2024	1	Baik
Wireless Clip- on	2024	1	Baik
Yollobox	2024	1	Baik
Laptop	2024	1	Baik
Harddisk Eksternal	2024	1	Baik
Camcoder	2024	1	Baik

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84

Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. Sistematika Pelaporan

Dokumen LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

B. Maksud Dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

a. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.

b. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Menguraikan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan targetnya pada Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menyajikan kerangka pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi

B. Capaian Kinerja

Menyajikan Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menyajikan Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Anggaran 2024 yang diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan sasaran

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rincian belanja per-program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”**.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan

berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi dan tata laksana melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah: **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah **“Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian”**.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan administrasi kantor, perencanaan program kerja, anggaran, sarana dan prasarana, evaluasi, pelaporan, koordinasi dan konsultasi serta pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana kantor;
- b. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat struktural administrasi dan teknis; dan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penyediaan sarana dan prasarana.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote

Ndao dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
- b. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik,

- c. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, melalui Kegiatan Pengelolaan *E-Government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; dan
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
- e. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formula Pengukuran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 (sembilan) unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan pelaksanaan SPBE (Permenpan Nomor 5/2018)
	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
		Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang diamankan}}{\text{Keseluruhan aplikasi yang digunakan oleh Pemda}} \times 100$
		Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang diamankan}}{\text{Keseluruhan aplikasi yang digunakan oleh Pemda}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	99,90
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,00
	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85
		Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data	%	90,91
		Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi	%	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar ≤0% maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan “Efektif” dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan “Kurang Efektif”.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian kinerja Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 digambarkan dalam table 3.2.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	99,90	99,90	100,00	Sangat Tinggi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,000	3,35	111,67	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan				105,83	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TUJUAN					105,83	Sangat Tinggi

Sumber : Olahan Data, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan

menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan dan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar **105,83%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**,

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 digambarkan dalam table 3.3.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya pelayanan komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85	100,00	117,65	Sangat Tinggi
	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	90,91	100,00	110,00	Sangat Tinggi
	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	85	100,00	117,65	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				115,10	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					115,10	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **115,10%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dan rata-rata capaian indicator kinerja sasaran sebesar **115,10%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan aspek kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

1. Capaian Kinerja Tujuan

TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Pemerintah karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memandatkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja pelaksana di lingkungan organisasinya secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi berdasarkan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Secara umum tujuan dari pengukuran IKM adalah mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan performa kelembagaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Sementara tujuan khususnya adalah untuk:

1. mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang telah dilaksanakan;
2. mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari setiap komponen dalam pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan

- menyediakan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diukur dengan indikator kinerja “**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**” dan “**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**” tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao yang terdapat pada table 3.4

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	99,90	99,90	99,90	100,00	99,90	100,00	100,00
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,99	3,00	3,35	111,67	3,00	112,04	111,67
Capaian Kinerja Tujuan						105,83	Sangat Tinggi		

Sumber : Olahan Data, 2024

- Capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 99,90 poin atau dengan predikat “**Sangat Baik**” Capaian ini merupakan hasil pelaksanaan pengukuran IKM yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Pelaksanaan Pengukuran IKM berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan mengacu pada 9 (Sembilan) unsur penilaian sebagaimana pada table 3.5

Tabel 3.5
Tabel Survei Kepuasan Masyarakat

PENGOLAHAN DATA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN										
NO URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
NRR / Unsur	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
NRR tertbg/ unsur	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	*) 3,996
IKM Unit pelayanan										**) 99,900

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
- U1 s.d. U14	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	4,000
- NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur	4,000
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu pelayanan	4,000
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Biaya/tarif	4,000
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Produk layanan	4,000
		U6	Kompetensi pelaksana	4,000
		U7	Perilaku pelaksana	4,000
		U8	Maklumat Pelayanan	4,000
		U9	Penanganan Pengaduan	4,000
IKM UNIT PELAYANAN : 99,90				
MUTU PELAYANAN : SANGAT BAIK				
Mutu Pelayanan :				
A (Sangat Baik)	88,31-100,00			
B (Baik)	76,61 - 88,3			
C (Kurang Baik)	65 - 76,6			
D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99			

Sumber data : Sekretariat dinas KOMINFO 2024

Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan Capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 99,90 poin dan terealisasi sebesar 99,90 poin dengan capaian kinerja 100%.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 99,90 poin, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 99,90 poin, maka menunjukkan bahwa capaian tahun 2023-2024 menunjukkan capaian yang sama dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.1

Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024



Sumber : Data Bidang Komunikasi

Analisis Tren beberapa tahun terakhir

Tren realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023-2024 menunjukkan capaian kinerja yang sama.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 99,90 poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 99,90 poin, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir renstra 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

2. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 3,35 skor atau dengan predikat **“Baik”**. Indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menunjukkan bahwa Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan skor sebesar 3,35 atau Predikat Baik. Dimana Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kemenpan RB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE, dimana terdapat 47 indikator penilaian di domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa Capaian kinerja Indeks SPBE telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Indeks Sistem Pemerintahan berbasis

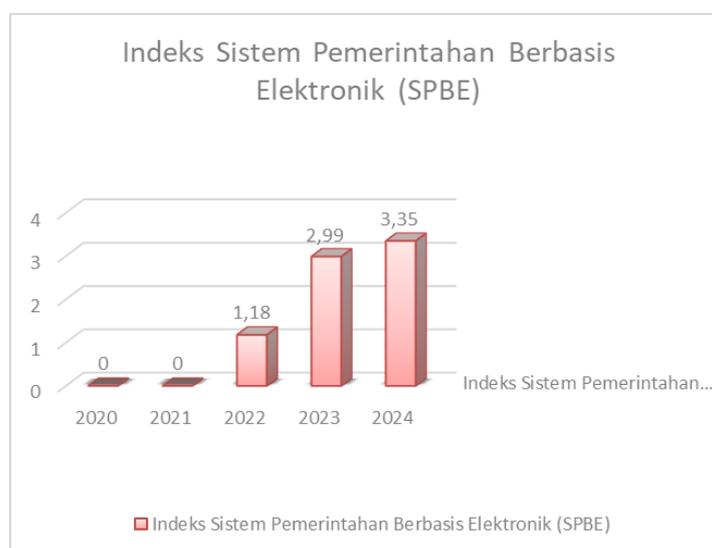
Elektronik (SPBE) ditarget sebesar 3.00 dan terealisasi sebesar 3.35 dengan capaian kinerja sebesar 111,67% .

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,35, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 2,99, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,36 dan capaian kinerja sebesar 112,04.

Gambar 3.2

Tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Sumber : Data Bidang Informatika

Analisis Tren beberapa Tahun terakhir

Tren realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang signifikan yaitu periode tahun 2022-2024.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Indikator Kinerja Indeks SPBE tahun 2024 dengan skor sebesar 3,35 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 3,00, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA dengan capaian kinerja sebesar 111,67%.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja tujuan tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.4 diatas, maka disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** tahun 2024 adalah sebesar **105,83%** atau dengan kategorikan **Sangat Tinggi**. Selain itu, analisis perbandingan-perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberhasilan tersebut menunjukkan kondisi yang optimis untuk meningkatkan kualitas dan performa pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sehingga meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun-tahun mendatang.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, melalui peningkatan transparansi dan responsibilitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian berbasis *e-goverment*;
- 2) Tersedianya produk regulasi/kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) Tersedianya infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang mampu mendukung *running*-nya aplikasi utama dilingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (*e-planning, e-budgeting, e-perijinan, e-sakip, e-procurement, e-auditee, e-Rekon&LK* dan lain-lain); dan
- 4) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran ini masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Terbatasnya anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:
 - Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagai dasar usulan kebutuhan aparatur kepada pimpinan daerah; dan
 - Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara teknis maupun fungsional.
- 2) Peningkatan anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, melalui Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Telaahan Staf/Informasi Staf; dan
- 3) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:
 - Pemeliharaan (*maintenance*) sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat digunakan secara efektif dalam penggunaannya;
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia melalui *Upgrading/Updating* perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) pendukung pelayanan; dan

- Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan guna pendukung pelayanan.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 100.513.000 (*Seratus juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) terealisasi 100%, dan Program Aplikasi Informatika, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.338.456.999,- (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 338.311.750,- (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau (99,96%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
105,83	100,00	0,00	Efisien	1,06	Efektif

Sumber : Olahan Data, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,00% atau dikategorikan

Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,06 sehingga dikategorikan Efektif.

2. Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN

Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam memasuki era keterbukaan saat ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao akan lebih meningkatkan pelayanan untuk memprioritaskan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam kerangka Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-goverment*) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Rote Ndao perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Rote Satu Data.

Selain itu, Kebijakan urusan persandian diarahkan pada program persandian untuk pengamanan informasi. Persandian memegang peranan penting dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, sehingga diharapkan perangkat daerah yang mengurus urusan persandian dapat menjaga keamanan data dan informasi daerah dalam memperlancar komunikasi antar perangkat daerah.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil evaluasi/penilaian dari Komisi Informasi mengenai keterbukaan

informasi publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun.

2) Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data

Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data berdasarkan formulasi indikator kinerja utama adalah jumlah perangkat daerah yang terintegrasi dalam sistem Satu Data dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

3) Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Aplikasi.

Indikator kinerja Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi berdasarkan formulasi indikator kinerja utama adalah jumlah aplikasi yang diamankan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dibandingkan dengan keseluruhan aplikasi yang digunakan. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik perlu adanya keamanan terhadap informasi pada kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara atau pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	76,76	85	100,00	117,65	100	130,28	100,00
2.	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	88,89	90,91	100,00	110,00	100	112,50	100,00
3.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	69,23	85	100,00	117,65	100	144,45	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						115,10	Sangat Tinggi		

Sumber : Olahan Data, 2024

1. Indikator Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mendapatkan Indeks skor sebesar 100 atau dikategorikan Informatif.

Pencapaian ini merupakan hasil evaluasi atas kinerja pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao baik melalui layanan Aplikasi/Portal berbasis Android “**Rote Ndao Smart Service**”, Website Pemda www.rotendaokab.go.id, Media Sosial (Youtube, Facebook dan Instagram) dan layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) <http://ppid.rotendaokab.go.id/>, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Layanan Informasi Publik Tahun 2024

No	Media	Jumlah Informasi Publik	Keterangan
1	Website Pemda	352	Berita/Informasi/Dokumentasi
2	Aplikasi Rote Smart Service	352	Berita/Informasi/Dokumentasi
3	Youtube Diskominfo	27	Berita/Informasi/Dokumentasi
4	Facebook Diskominfo	352	Berita/Informasi/Dokumentasi
5	Instagram Diskominfo	352	Berita/Informasi/Dokumentasi
6	Website PPID	668	Berita/Informasi/Dokumentasi
	Total	2.103	

Sumber : Data Bidang Komunikasi, Kondisi 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa Capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditarget sebesar 85 dan terealisasi sebesar 100 dengan capain kinerja sebesar 117,65% .

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 76,76%, maka menunjukkan bahwa tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 23,24% dan capaian kinerja sebesar 130,28%

Gambar 3.3
Tren Indeks Keterbukaan Informasi Publik



Sumber : Data Bidang Komunikasi

Analisis Tren beberapa Tahun terakhir

Tren realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang signifikan yaitu periode tahun 2023-2024.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir renstra 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data

Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.

Penyelenggaraan Statistik Rote Ndao Satu Data menunjukkan bahwa perangkat yang terintegrasi dalam Satu Data adalah 45 (empat puluh lima) perangkat daerah dari keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atau dengan persentase sebanyak 100%.

Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data ditargetkan sebesar 90,91% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 110,00% .

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 88,89 menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 11,11%, dan capaian kinerja sebesar 112,50%

Gambar 3.4
Tren Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data



Sumber : Data Bidang Statistik

Analisis Tren beberapa Tahun terakhir

Tren realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang signifikan yaitu periode tahun 2023-2024.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data pada tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 88,89, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir renstra 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

3. Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi.

Pengamanan aplikasi perangkat daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) aplikasi atau 100% dari total keseluruhan aplikasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dengan rinciannya pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Layanan Aplikasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Pada Tahun 2024

	Nama Aplikasi / Website	Perangkat Daerah Penyelenggara	Unsur SPBE
1	Pantau PMT	Dinas P3AP2KB	G2C : e- Kesehatan
2	Aplikasi Kalkulator Gizi	Dinas P3AP2KB	G2C : e- Kesehatan
3	SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional)	Diskominfostaper	G2G : e-Monev
4	Website Pemda : rotendaokab.go.id	Diskominfostaper	G2G : e-Office
5	Daftar Hadir Online	Diskominfostaper	G2E : Kepegawaian
6	Aplikasi Pantau Menara	Diskominfostaper	G2G : e-Monev
7	Aplikasi Rekomendasi Menara	Diskominfostaper	G2G : e- Office
8	Rote Smart Service	Diskominfostaper	G2G : e-Office
9	Aplikasi Rote Satu Data	Diskominfostaper	G2G : e-Office
10	Website Diskominfo	Diskominfostaper	G2G : e-Office
11	Sistem Informasi Gaji PNS	Badan Keuangan dan Aset	G2G : e-Budgeting
12	Simda Keuangan	Badan Keuangan dan Aset	G2G : e-Budgeting
13	Maneleo Aplikasi Manajemen Internal Organisasi)	Bapelitbangda	G2G : e-Office
14	Gerbang Linsek	Bapelitbangda	G2G : e-Office
15	Tulufali	Bapelitbangda	G2C: e-Kesehatan
16	e-Vevali Malole	Bagian Organisasi	G2G : e-Office
17	Aplikasi Manek (Manajemen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja)	Bagian Organisasi	G2G : e-Office
18	Website Disbudpar	Disbudpar	G2G : e-Office
19	Explore Rote	Disbudpar	G2G : e-Office
20	Si Peka	Dinas Perkim & LH	G2G : e-Office
21	Manahoro	Dinas Perkim & LH	G2G : e-Monev
22	Simpak	Dinas Perkim & LH	G2C : e-Office
23	iPusRoteNdao	Dinas Perpustakaan & Arsip	G2G : e-Office
24	Manedombe	Bagian Hukum	G2G : e-Office
25	SIM Obat	Dinas Kesehatan	G2C : e- Kesehatan
26	Mamaboi	Dinas Kesehatan	G2C : e- Kesehatan
27	Donor Darah	Dinas Kesehatan	G2G : e-Kesehatan
28	SIM Obat	RSUD Ba'a	G2C : e-Kesehatan
29	Aplikasi Ita Esa	Dinas PMD	G2G : e-Monev
30	KaaFadi	Dinas PMD	G2G : e-Monev

Sumber : Olahan Data Bidang Informatika DKISP Rote Ndao, Kondisi 31 Desember 2024

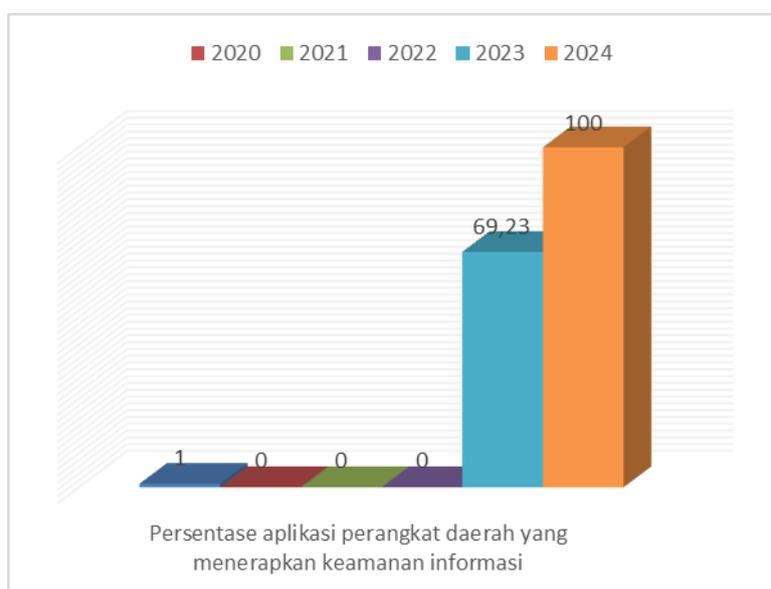
Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa Capaian kinerja Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024. Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Aplikasi ditarget sebesar 85 dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 117,65% .

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi Tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 69,23%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 30,77% dan capaian kinerja sebesar 117,65%.

Gambar 3.5
Tren Persentase Aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi



Sumber : Data Bidang Persandian

Analisis Tren beberapa Tahun terakhir

Tren realisasi Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang signifikan yaitu periode tahun 2023-2024.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Informasi pada tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir renstra 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.7 diatas, maka disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** tahun 2024 adalah sebesar **115,10%** atau dengan kategorikan **Sangat Tinggi**. Selain itu, analisis perbandingan-perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan kondisi yang optimis untuk meningkatkan kualitas dan performa pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dalam Satu Data dan Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Yang Menereapkan Keamanan Informasi tahun-tahun mendatang.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 5) Adanya komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**”, melalui peningkatan kinerja pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian berbasis *e-government*;
- 6) Tersedianya produk regulasi/kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 7) Tersedianya infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang mampu

- mendukung *running*-nya aplikasi utama dilingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (*e-planning, e-budgeting, e-perijinan, e-sakip, e-procurement, e-auditee, e-Rekon&LK* dan lain-lain); dan
- 8) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran ini masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 5) Terbatasnya anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:
 3. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagai dasar usulan kebutuhan aparatur kepada pimpinan daerah; dan
 4. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara teknis maupun fungsional;
- 5) Peningkatan anggaran pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, melalui Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Telaahan Staf/Informasi Staf; dan
- 6) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui:

5. Pemeliharaan (*maintenance*) sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat digunakan secara efektif dalam penggunaannya;
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia melalui *Upgrading/Updating* perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) pendukung pelayanan; dan
7. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan guna pendukung pelayanan.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan dukungan anggaran untuk 3 (tiga) program sebesar Rp.492.087.499,- (*Empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp.491.942.150,- (*Empat ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 99,97%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.10**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
115,10	100,00	-	Efisien	1,15	Efektif

Sumber : Olahan Data, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,15 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektifitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari

efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja operasi dan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran		Jumlah	Realisasi	
		Belanja Operasi	Belanja Modal		Jumlah	%
1	Belanja Operasi	2.578.648.023		2.578.648.023	2.487.927.613	96,48
	2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.229.176.524			2.487.927.613	111,61
	2.1.1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.502.710			7.502.500	100,00
	2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.709.700			3.709.700	100,00
	2.1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.793.010			3.792.800	99,99
	2.1.2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.042.768.014			1.953.929.663	95,65
	2.1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.986.728.014			1.906.289.663	95,95
	2.1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi	56.040.000			47.640.000	85,01
	2.1.3 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.000.000			9.000.000	100,00
	2.1.3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000			9.000.000	100,00
	2.1.4 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.134.300			54.134.150	100,00
	2.1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.200.300			10.200.150	100,00
	2.1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	20.495.000			20.495.000	100,00
	2.1.5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	23.439.000			23.439.000	100,00
	2.1.6 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.721.500			60.617.100	99,83
	2.1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.991.000			3.991.000	100,00
	2.1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.730.500			56.626.100	99,82
	2.1.7 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.050.000			53.289.400	96,80
	2.1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.050.000			53.289.400	96,80

2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		50.361.000	50.152.000	100.513.000	100.513.000	100,00
2.2.1	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		50.361.000	50.152.000	100.513.000	100.513.000	100,00
2.2.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		50.361.000			50.361.000	100,00
	Belanja Modal			50.152.000	50.152.000	50.152.000	100,00
2.3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		245.992.999	92.464.000	338.456.999	338.311.750	99,96
2.3.1	KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		245.992.999	92.464.000	338.454.999	338.311.750	99,96
2.3.1.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		106.880.000		106.880.000	106.880.000	100,00
2.3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		139.112.999		139.112.999	139.096.400	100,00
	Belanja Modal			92.464.000	92.462.000	92.335.350	99,86
2.4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		29.127.500			29.127.400	100,00
2.4.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		29.127.500			29.127.400	100,00
2.4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		14.739.500			14.739.400	100,00
2.4.1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral		14.388.000			14.388.000	100,00
2.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		23.990.000			23.990.000	100,00
2.4.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.990.000			23.990.000	100,00
2.4.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		23.990.000			23.990.000	100,00
2	Belanja Modal			142.616.000	142.616.000	142.487.350	99,91
	TOTAL		2.578.648.023	142.616.000	2.721.264.023	2.630.414.963	96,66

Sumber :Laporan Keuangan Dinas KOMINFO, Statistik dan Persasndian TA. 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp.2.578.648.023,- (*Dua Miliar Lima Ratus tujuh Puluh delapan Juta enam Ratus empat Puluh delapan Ribu Dua Puluh Tiga rupaih*) terealisasi sebesar Rp.2.487.927.613,- (*Dua miliar empat ratus delapan Puluh tujuh Juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah*) atau 96,48%; dan
- b. Belanja Modal Rp. 142.616.000- (*Seratus empat puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 142.487.350- (*Seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau 99.91%

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17
Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	105,83			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100.513.000,00	100.513.000,00	100,00	-	-	Efisien	1,06		Efektif
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	111,67				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA/Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	338.456.999,00	338.311.750,00	99,96	145.249	0,04	Efisien			Efektif
	Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik		115,10	117,65		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100.513.000	100.513.000	100,00	-	-	Efisien	1,15	1,18	Efektif
		2. Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data			110,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL/Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.127.500	29.127.400	100,00	100			Efektif		
		3. Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi			117,65		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI/Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.990.000	23.990.000	100,00	-			Efektif		
Kinerja Penunjang Lainnya							Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	2.229.176.524	2.138.472.813	95,93	90.703.711	4,07	Efisien			
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan			105,83	105,83			Total Anggaran	2.721.264.023	2.630.414.963	96,66	90.849.060	3,34	EFISIEN	1,09		EFEKTIF
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					115,10	115,10									1,19	EFEKTIF

Sumber data : Realisasi keuangan Dinas KOMINFO TA. 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.2.721.264.023,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Juta*) terealisasi sebesar Rp.2.630.414.963,- (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta*) atau sebesar 96,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 90.849.060,- (*Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus empat puluh sembilan Ribu enam puluh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,34% atau dikategorikan "**Efisien**". Selain itu, berdasarkan rasio rata-rata capaian indikator kinerja **1,09** % terhadap realisasi anggaran (96,96%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian kinerja sebesar **1,19** atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan "**Efektif**".

BAB IV

P E N U T U P

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian kinerja indikator tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** sebesar **105,85%** (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** sebesar 110,47% (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 menunjukkan kondisi yang positif dan optimis guna meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan kinerja akan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang solutif untuk mengatasi kendala yang masih dihadapi.

Ba'a, Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.													
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima													
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Infomtika, Statistik dan Persandian													
Masalah Pokok			Masalah			Akar Masalah								
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			Belum memadainya sarana dan prasarana didinas			- Ketersediaan SDM yang masi rendah - Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia pengelola komunikasi, informatika, statistik dan persandian (tenaga programer dan sandiman bersertifikat) - Belum maksimalnya pemanfaatan layanan diseminasi informasi dari aspek penggunaan maupun jumlah informasi yang diupload (PPID)								
Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KEPALA DAERAH			KEPALA PD			ESELON III				ESELON IV				
Meningkatnya transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	2021:100 %	Meningkatnya transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2021: 100 %	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	2021: 100%	1,974,700,330	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	19 dokumen	7,502,710	
		2022:100 %			2022:100 %			2,172,170,363				12 dokumen		3,709,700
		2023:100 %			2023:100 %			2,229,176,524				7 dokumen		3,793,010
		2024:100 %			2024:100 %			2,721,264,023				12 Bulan		2,042,768,014
												12 Bulan		1,986,728,014
												12 Bulan		56,040,000
												2 Org		9,000,000
												2 Org		9,000,000
														54,134,300

Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	20,495,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Penggandaan - Tersedianya Barang Cetak/Jilid	- 28000 Lembar - 20 Buku	10,200,300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam daerah Kabupaten dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	10 Kali	23,439,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		60,721,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan pengadaan materai	400 lembar	3,991,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 bulan	56,730,500
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		55,050,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit dan pembayaran pajak 6 unit	55,050,000
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	2021: 2.17 % 2022: 2.17 % 2023: 100 % 2024: 100 %	46,000,000 46,460,000 81,840,400 100,513,000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	75 Konten 100,513,000

					Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi (PPIID)	100 %	100,513,000
					APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya layanan informatika daerah 2021: 1.50 % 2022: 1.62 % 2023: 1.82 % 2024: 1.82 %	257,999,700 260,580,000 338,456,999 338,456,999	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya layanan informatika daerah	100 % 338,456,999
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya layanan informatika daerah		
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Tersedianya pusat data pemerintah daerah	100%	106,880,000
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tersedianya aplikasi berbasis Elektronik	100 %	231,576,999
					PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Meningkatnya pengelolaan/pe manfaatan Rote Satu Data 2021: 0 % 2022: 0 % 2023: 0 % 2024: 0 %	79,999,800 340,000,000 29,127,500 29,127,500	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	76,09 % 29,127,500
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dari Rote Ndao satu data	12 bulan	14,739,500
						Membangun Metadata Statistik Sektoral Tersedianya Metadata Statistik dan Pengembangan Data Layanan Statistik Sektoral	12 bulan	14,388,000
					PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya kemanaan Informasi 2021: 0 % 2022: 23.08 % 2023: 69.23 % 2024: 84.62 %	49,997,500 1,049,997,500 23,990,000 23,990,000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Keamanan Informasi	69,21 % 23,990,000
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan SDM keamanan	100%	23,990,000

Ba'a, Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Rote Ndao,

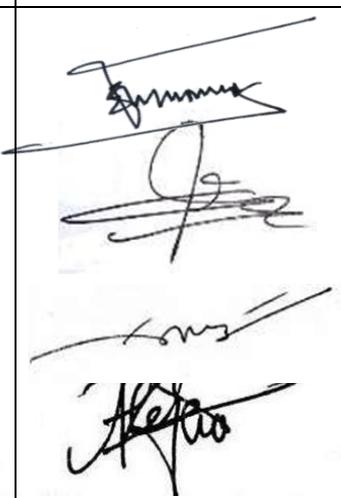
Pauwli J. Nggili, S.Sos, M.Si

NIP. 19198107252006041018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan pelaksanaan SPBE (Permenpan no. 5/2018)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2		Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Hasil penilaian keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi dalam sistim satu data / Jumlah total perangkat daerah x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	Jumlah aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi / Jumlah seluruh aplikasi PD x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP TA. 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Pejabat Fungsional	1.1. Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator, PK 2024	
2	Bidang	2.1. Data Indikator Kinerja Perbidang diupdate	
3	Sekretaris	2.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
4	Kepala Dinas	3.1 Final Reviu, Indikator Capaian dan penyebab target tidak tercapai	

Ba'a, Januari 2025

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS KOMINFO,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN,

PAUWIL J.J NGGILI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19810725 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pauwil J. J. Nggili, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oder Maks Sombu, SH, MA, MH

Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA

Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN ROTE NDAO,



PAUWIL J. J. NGGILI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	99,90
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.00
2		Meningkatnya pelayanan komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85
			Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	Persen	90,91
			Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	Persen	85
NO	PROGRAM		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1.	Pengelolaan Aplikasi Informatika		Rp. 338.456.999,-	DAU	
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Rp. 100.513.000,-	DAU	
3.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Rp. 29.127.500,-	DAU	
4.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Rp. 23.990.000,-	DAU	
5.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 2.229.176.524,-	DAU	
	Jumlah		Rp. 2.721.264.023,-		

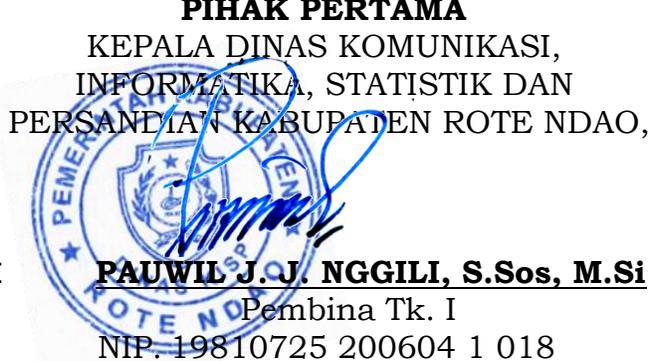
Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO,



PAUWIL J. J. NGGILI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810725 200604 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jl.Lekunik
Telepon/Faximile (0380) 8571039, 8571040 Ba'a

Website : www.rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	99,90
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.00
2		Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85
			Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	Persen	90,91
			Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	Persen	85

Ba'a, 11 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO,

PAUWIL J. J. NGGILI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH

Tujuan Sekretaris Daerah

Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Indikator:

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Tujuan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Indikator:

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)

Ultimate Outcome /makro

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO

Tujuan

Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Indikator:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (point) (99,90)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) (3,00)

Sasaran:

Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Indikator:

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (skor) (85)

Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data (%) (90,91)

Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi (%) (85)

Intermediate outcome/meso	Intermediate outcome/meso	Intermediate outcome/meso	Intermediate outcome/meso	Intermediate outcome/meso
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI / OLAFUHA M.A.TADDE, S.Kom	KEPALA BIDANG INFORMATIKA / NIHEL EFRAM HENDRIK, SH	KEPALA BIDANG STATISTIK (TENSY JULIANA NONI, S.Sos)	SEKRETARIS (MARDANI AYAPI PATOLA, ST, M.Sc)	KEPALA BIDANG PERSANDIAN (MELKIANUS DAMI, S.Sos)
Meningkatnya kualitas pelayanan Komunikasi	1. Indeks Kematangan Domain Kebijakan SPBE 2. Indeks Kematangan Domain Tata Kelola 3. Indeks Kematangan Domain Manajemen SPBE 4. Indeks Kematangan Domain Layanan SPBE	Meningkatnya kualitas layanan Data Statistik Sektoral	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Persandian di daerah
Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:
Persentase Layanan Keterbukaan Informasi Publik	1. Indeks Kematangan Aspek Kebijakan 2. Indeks Kematangan Aspek Perencanaan Strategis 3. Indeks Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komuksi 4. Indeks Kematangan Aspek Penyelenggaraan SPBE 5. Indeks Kematangan Aspek Penerapan Manajemen SPBE 6. Indeks Kematangan Aspek Audit TI 7. Indeks Kematangan Aspek Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 8. Indeks Kematangan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Persentase pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor 3. Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tepat waktu	Jumlah laporan pelaksanaan Persandian di daerah

	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Endeian Sarungallo, SS, M.I.Kom)		Statistisi Ahli Muda (Soni A. Zacharya, SS)		Kepabisa Umum dan Kepegawaian (Melsy M. Daullima, SE)		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Martha Dafojo, SE)		Perencana Ahli Muda (Towenti A.E.Panis, SE)		Sandiman Ahli Muda (Florida A. Foes, ST)	Sandiman Ahli Muda (Dikson Yandry Hendrico, ST)	
	1. Indeks Kematangan Domain Kebijakan SPBE 2. Indeks Kematangan Domain Tata Kelola 3. Indeks Kematangan Domain Manajemen SPBE 4. Indeks Kematangan Domain Layanan SPBE		Tersedianya dokumen data Statistik Sektoral		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan administrasi umum lainnya sesuai regulasi		Terwujudnya Pelayanan Administrasi penganggaran keuangan sesuai regulasi.		Terwujudnya Pelayanan Administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai regulasi.		Terwujudnya penyelenggaraan Persandian di daerah	Terwujudnya pola hubungan komunikasi sandi di daerah	
	Indikator:		Indikator:		Indikator:		Indikator:		Indikator:		0	0	
	1. Indeks Kematangan Aspek Kebijakan Internal SPBE 2. Indeks Kematangan Aspek Perencanaan Strategis 3. Indeks Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komuksi 4. Indeks Kematangan Aspek Penyelenggaraan SPBE 5. Indeks Kematangan Aspek Penerapan Manajemen SPBE 6. Indeks Kematangan Aspek Audit TI 7. Indeks Kematangan Aspek Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 8. Indeks Kematangan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen data statistik sektoral		1. Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu 2. Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai regulasi 3. Persentase Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah sesuai regulasi		Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah		1. Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan 2. Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian di daerah	Jumlah laporan pola hubungan komunikasi sandi di daerah	
Analisis Sistem Informasi (Mas Mubudu, SH)	Pengelola Media Center dan Komunikasi Media (Jonas N. Messakh)	Analisis Berita (Jerri Mabilaha, S.Sos)	Penata Ujapan (Syeny Y.Z. Tonak)	Analisis Sistem Informasi (Soni Bastian Nosa, A.Md)	Pengelola Teknologi Informasi (Seri Yunita Adu, S.Kom)	Analisis Sistem Informasi (Mahalia D.V. Itha G.A.S.Kom)	Analisis Statistik (Mario T. Mario, S.Stat)	Pengadministrasi Kepegawaian (Safitriana D. Therea)	Bendahara Pengelolaan (Henry S. Lesik)	Analisis Barang Milik Negara (Harun Napu)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Paramita S. Meroch, S.Kom)	Sandiman Terampil (Yacobus Nesi, A.Md)	
Persentase Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi	1. Indeks Kematangan Aspek Kebijakan	1. Indeks Kematangan Aspek Perencanaan	1. Indeks Kematangan Aspek Administrasi	1. Tersedianya indikator data Statistik Sektoral	1. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Tertelaksananya Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Menurunnya kerentanan keamanan informasi, keamanan jiber dan persandian di	

Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	2. Indeks Kemampuan Aspek Perencanaan Strategis	Strategis SPBE 3. Indeks Kemampuan Aspek Manajemen SPBE	Pemerintah Berbasis Elektronik 2. Indeks Kemampuan 3. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3. Tersedianya persentase peningkatan aplikasi Satu Data Rote Ndao								daerah
Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :
Persentase Pengembangan Website PPID	Jumlah Laporan Pengumuman Informasi Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Regulasi Informasi Publik	Jumlah Laporan Pelayanan Informasi Publik (SDM PPID dan Pemohon Informasi)	1. Jumlah Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (10 indikator) 2. Jumlah Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (4 indikator) 3. Jumlah Aspek Penyelenggara SPBE (2 indikator)	1. Indikator Aspek Perencanaan Strategis SPBE (4 indikator) 2. Indikator Aspek Penerapan Manajemen SPBE (8 indikator) 3. Indikator Aspek Pelaksanaan Audit TIK (3 indikator)	1. Indikator Kemampuan Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik (10 indikator) 2. Indikator Kemampuan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (6	1. Jumlah indikator data statistik sektoral 2. Persentase Pengembangan aplikasi Satu Data Rote Ndao		1. Indikator : Persentase penyediaan surat di luar negeri yang berkaitan dengan tugas Pengadministrasian Kewarganegaraan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 2. Persentase Administrasi Pengajuan gaji dan tunjangan ASN 3. Persentase penyelesaian SPI tepat waktu 4. Persentase pencatatan administrasi keuangan sesuai regulasi	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 3. Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1. Persentase penyediaan kontak/nakiah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Persentase penyediaan informasi olahan data sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan pemantauan program dan pelaporan tiap bidang	Jumlah laporan keamanan informasi, keamanan siber dan Persandian di daerah.		

Ba'ta, 15 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kab. Rote Ndao,

Hasan J. Tuguti, S.Sos, M.Si
NIP. 19810720200604218



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jalan Lekunik- Ba'a Telp/ Fax. (0380) 8571439,8571440

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 700/03 /DKISP/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao;

- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si
NIP. 19810725 2006041 018

Tembusan :

1. Pj. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 700/03 /DKISP/2025
 TANGGAL : 13 Januari 2025
 TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si NIP 198107252006041018	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Maraden Ayapi Patola, ST, M.sc NIP 198103302008021001	Sekretaris	Ketua
3.	Twenty A.E Panie, SE NIP 197508202007011017	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Olafulihaa M.A Tadde, S.Kom NIP 198204162006042028	Kepala Bidang Komunikasi	Anggota
5.	Tensy J. Non, S.Sos NIP. 197407302006042013	Kepala Bidang Statistik	Anggota
6.	Melkianus Dami, S.Sos NIP. 197908122005011012	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Meisy M. Daulima, SE NIP 197905062006042012	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Nihel Efraim Hendrik, SH NIP. 197111212005011008	Kepala Bidang Informatika	Anggota
9.	Martha Dadjo, SH NIP. 198105032007012009	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
10.	Unsur Staf		Staf semua Bidang dan Sekretariat

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
 dan Persandian Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J Nggili, S.Sos, M.Si
 NIP. 19810725 200604 1 018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KAB. ROTE NDAO**

TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO
KOMPLEKS PERKANTORAN BUMI TII LANGGA PERMAI

Jln. Lekunik - Baa

Telpn ☎ (0380) 871022

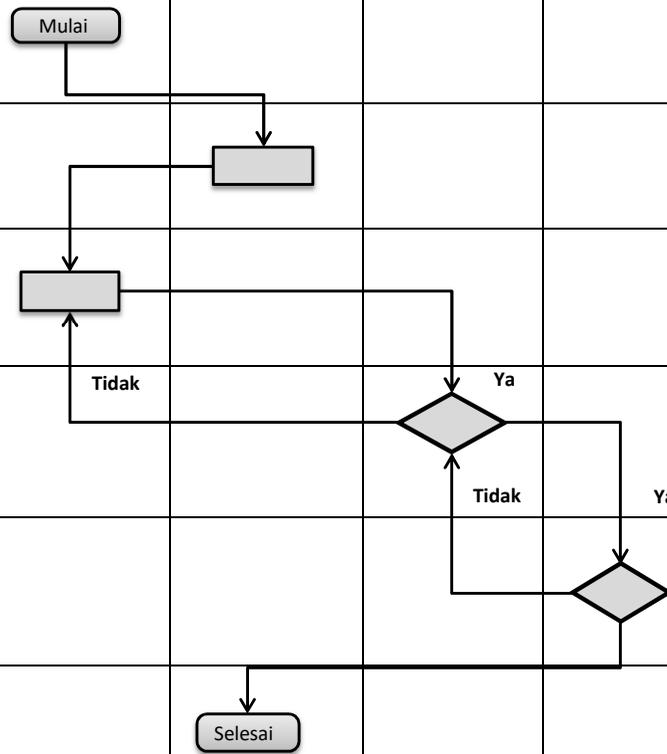
WEBSITE : www.rotendaokab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT**

Nomor SOP -AP	DKISP. 065/16/ IX/ KAB.RN/ 2019
Tanggal Pengesahan	30 September 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao  Drs. Wilhelmus Mooy, M.Si NIP. 19621224 198603 1 013
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S12. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja3. Memahami tata naskah dinas
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)3. SOP Penanganan Surat Masuk4. SOP Penanganan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis Kominfo, Satper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menugaskan Analisis untuk mengumpulkan bahan kelengkapan Penyusunan LKIP Dinas	Mulai				Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan data-data Realisasi Program Anggaran dari masing-masing Bidang dan menyerahkan ke Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengkonsep Laporan LKIP Dinas kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	3 hari	Konsep laporan LKIP	
4.	Memeriksa Draf laporan LKIP jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	3 jam	Konsep laporan LKIP	
5.	Memeriksa Draf laporan LKIP jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Analisis Perencanaan dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	30 menit	Laporan LKIP	
6.	Mengagendakan LKIP, menggandakan dan Mendistribusi					Laporan LKIP	20 menit	Laporan LKIP	





**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT**

Nomor SOP -AP	DKISP. 065/17/ IX/ KAB.RN/ 2019
Tanggal Pengesahan	30 September 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao
	 Wilhelmus Mooy, M.Si NIP. 19621224 198603 1 013
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao ;	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja 3. Memahami tata naskah dinas
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar	1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan LKPJ tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Dinas terkait	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis Kominfo, Satper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengumpulkan data data Realisasi Program Anggaran dari masing masing Bidang dan menyerahkan ke Kasubag	Mulai				Agenda Kerja	2 jam	Disposisi	
2.	Menyusun LKPJ Dinas dan menyampaikan kepada Sekretaris					Disposisi	5 hari	Disposisi	
3.	Memeriksa Draf LKPJ Jika setuju diparaf dan disampaikan ke kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Disposisi	2 Jam	Konsep laporan	
4.	Memeriksa Draf LKPJ Jika setuju ditandatangani jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Konsep laporan.	1 jam	Laporan LKPJ	
5.	Mengagendakan, mengarsipkan dan Mendistribusi	Selesai				Laporan LKPJ	20 menit	Laporan LKPJ, Tanda Terima	

Mulai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

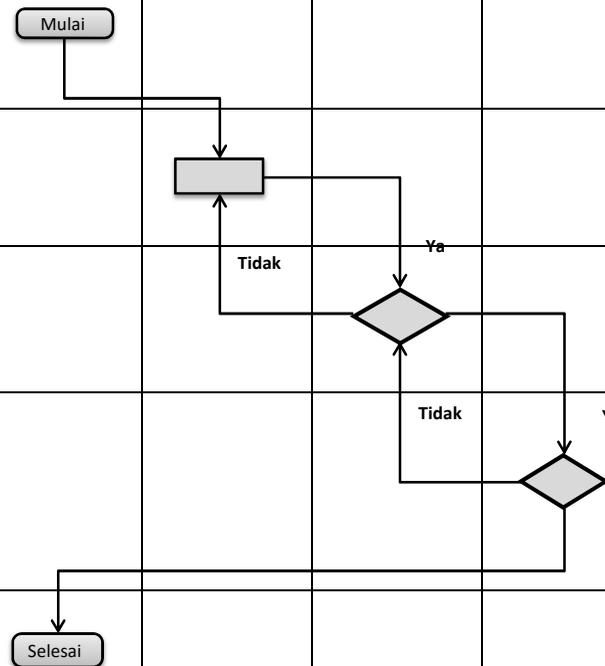
Selesai



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT**

Nomor SOP -AP	DKISP. 065/18/ IX/ KAB.RN/ 2019
Tanggal Pengesahan	30 September 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao  Drs. Welhelmus Mooy, M.Si NIP. 196212/4 198603 1 013
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pemerintah2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S12. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja3. Memahami tata naskah dinas
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penanganan Surat Masuk2. SOP Penanganan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan LPPD tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Dinas terkait	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis Kominfo, Satper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengumpulkan data data Realisasi Program Anggaran dari masing masing Bidang dan menyampaikan ke Kasubag	Mulai				Agenda Kerja	2 jam	Disposisi	
2.	Menyusun Draf LPPD dan disampaikan kepada Sekretaris					Disposisi	5 hari	Disposisi	
3.	Memeriksa Draf LPPD Jika setuju diparaf dan disampaikan ke kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Disposisi	2 Jam	Konsep laporan	
4.	Memeriksa Draf LPPD Jika setuju ditandatangani dan menyerahkan ke Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Konsep laporan.	1 jam	Laporan LPPD	
5.	Mengagendakan, mengarsipkan dan Mendistribusi	Selesai				Laporan LPPD	20 menit	Laporan LPPD, Tanda Terima	



 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT	Nomor SOP -AP	DKISP. 065/19/ IX/ KAB.RN/ 2019
	Tanggal Pengesahan	30 September 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao
		 Drs. Welhelmus Mooy, M.Si NIP. 19621224/198603 1 013
Nama SOP- AP	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;		1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar		1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan RKT tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan RKT Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait		Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis Kominfo, Satper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengumpulkan data data Rencana Program Anggaran dari masing masing Bidang	Mulai				Agenda Kerja	2 jam	Disposisi	
2.	Melengkapi Draf RKT dan disampaikan kepada Sekretaris					Disposisi	3 hari	Disposisi	
3.	Memeriksa Draf RKT Jika setuju diparaf dan disampaikan ke kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Disposisi	2 Jam	Konsep laporan	
4.	Memeriksa Draf RKT Jika setuju ditandatangani jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Konsep laporan.	1 jam	Laporan RKT	
5.	Mengagendakan, mengarsipkan dan Mendistribusi	Selesai				Laporan KIP	20 menit	Laporan RKT, Tanda Terima	

Mulai

Selesai

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT	Nomor SOP -AP	DKISP. 065/20/ IX/ KAB.RN/ 2019
	Tanggal Pengesahan	30 September 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao
		 Dr. Wilhelmus Mooy, M.Si <small>19621224198603 1 013</small>
	Nama SOP- AP	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan 	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	
Apabila Penyusunan SOP PK tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan PK Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis Kominfo, Satper	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengumpulkan data data Realisasi Program Anggaran dari masing masing Bidang	Mulai				Agenda Kerja	2 jam	Disposisi	
2.	Melengkapi Draf PK dan disampaikan kepada Sekretaris					Disposisi	5 hari	Disposisi	
3.	Memeriksa Draf PK Jika setuju diparaf dan disampaikan ke kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Disposisi	2 Jam	Konsep Laporan	
4.	Memeriksa Draf PK Jika setuju ditandatangani jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Konsep Laporan.	1 jam	Laporan PK	
5.	Mengagendakan, mengarsipkan dan Mendistribusi					Laporan PK	20 menit	Laporan PK, Tanda Terima	

Mulai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Selesai